

# STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

*"BUSINESS INTEGRITY IN GLOBAL INITIATIVES AND NATIONAL ANTICORRUPTION STRATEGY"*



**STRANAS PK**



Oleh:

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

detik.com

## KPK Ajak Pemerintah dan Perusahaan Komitmen Cegah Korupsi Korporasi

Haris Fadhill - detikNews

Selasa, 08 Mei 2018

**Informasi** kepemilikan yang tertutup di sektor migas dan minerba menimbulkan potensi korupsi hingga penghindaran pajak. Untuk mengatasinya, pemerintah menggagas transparansi Beneficial Ownership (BO) melalui kerangka Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).


**3.772**

 dari **11 ribu**  
 usaha tambang  
 rawan korupsi

**Rp 28,5 triliun**  
 potensi kerugian negara

## Sektor Perizinan Masih Menjadi Lahan Empuk Korupsi Pejabat Daerah

Pemerintah diminta memperbaiki sistem perizinan di daerah. Selain itu, otoritas bursa diharapkan memiliki mekanisme pengaduan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat dibursa jika mengalami hambatan perizinan oleh pejabat di daerah.

Novrieza Rahmi



Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hibur

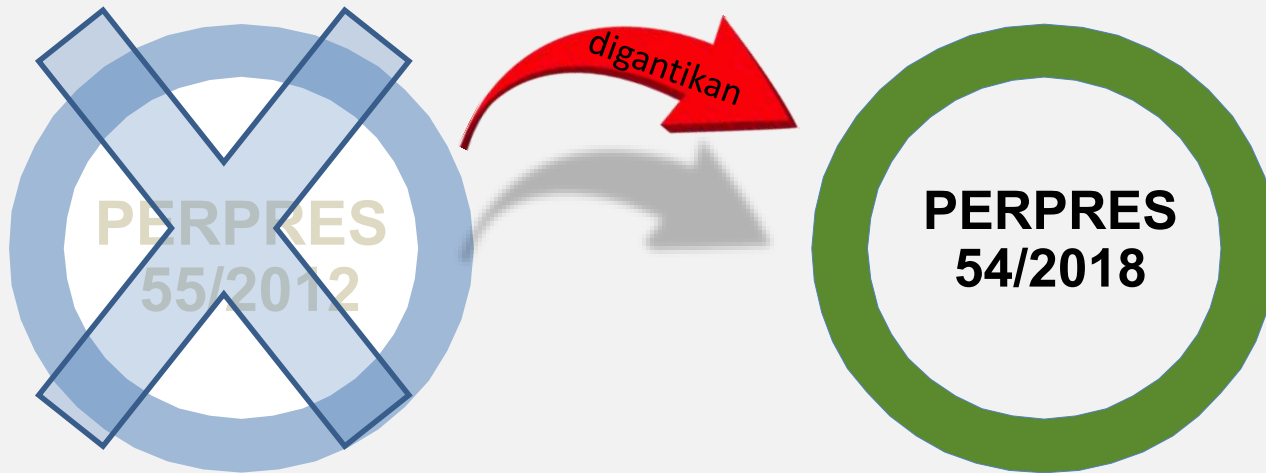
Home &gt; Nasional &gt; Berita Hukum Kriminal

## KPK: 90 Persen Korupsi Akibat Kolaborasi Pengusaha-Penguasa

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Rabu, 10/08/2016 08:20 WIB

- Upaya meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat dengan melakukan **konsolidasi** dan **penyusunan aksi bersama** antara Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya

## Peraturan Presiden



TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA  
MENENGAH 2012 – 2014 DAN JANGKA  
PANJANG 2012 – 2025

TENTANG STRATEGI NASIONAL  
PENCEGAHAN KORUPSI



## Perpres 55 /2012

Dikoordinasikan oleh : Bappenas dan Kemendagri



Kesekretariatan tidak dimandatkan

Terdiri dari 6 strategi :

1. Pencegahan
2. Penegakan Hukum
3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Asset
5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
6. Monitoring dan Pelaporan

## Perpres 54/2018

Dikoordinasikan oleh: Tim Nasional Pencegahan Korupsi



Sekretariat Nasional PK dimandatkan dan berkedudukan di KPK.







Menggabungkan seluruh inisiatif pencegahan korupsi dalam 3 focus/area intervensi:

1. Perizinan dan Tata Niaga
2. Keuangan Negara
3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi




AKSI  
PENCEGAHAN KORUPSI  
2019-2020

## PERIZINAN DAN TATA NIAGA

- 1 Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal 
- 2 Perbaiki Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan   

- 3 Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi 
- 4 Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis 
- 5 Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta 

## KEUANGAN NEGARA

- 6 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik 
- 7 Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa   

- 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak 

## PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIRKORASI

- 9 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi   

- 10 Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa 
- 11 Perbaiki Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

 Aksi di K/L sebagai PJ

 Aksi di Daerah sebagai PJ



AKSI  
01

### PENINGKATAN PELAYANAN & KEPATUHAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

#### SUB AKSI 1

Meningkatnya kemudahan berusaha di daerah bagi pengusaha kecil dan menengah

#### PENANGGUNG JAWAB

Kementerian Dalam Negeri

#### PENANGGUNG JAWAB

- o Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- o Badan Koordinasi Penanaman Modal
- o Kementerian Dalam Negeri
- o Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- o Kementerian Kesehatan
- o Kementerian Pertanian
- o Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- o Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- o Kementerian Komunikasi dan Informatika

#### OUTPUT

Dihapuskannya prasyarat pengajuan izin usaha di seluruh daerah yang sudah tidak diwajibkan oleh peraturan lebih tinggi

#### OUTPUT

- o Terintegrasinya aplikasi perizinan di K/L dengan *Online Single Submission (OSS)*
- o Terintegrasinya aplikasi perizinan di Pemda dengan *Online Single Submission (OSS)*
- o Terbangunnya mekanisme pengendalian kepatuhan pemohon izin yang mendapatkan pelayanan *Online Single Submission (OSS)*

#### SUB AKSI 2

Percepatan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik/*Online Single Submission (OSS)*

OSS



AKSI  
02

### PERBAIKAN TATA KELOLA DATA DAN KEPATUHAN SEKTOR EKSTRAKTIF, KEHUTANAN, DAN PERKEBUNAN



#### PENANGGUNG JAWAB

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Keuangan
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang

#### OUTPUT

- Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi
- Digunakannya basis data *Beneficial Ownership* untuk pencegahan penyalahgunaan *legal persons/ arrangements* untuk tujuan anti pencucian uang/pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan penyalahgunaan perpajakan
- Digunakannya basis data *Beneficial Ownership* sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit

SUB AKSI 2

Tersedianya dan dimanfaatkannya  
basis data *Beneficial Ownership* (BO)



AKSI  
**05**

### PENERAPAN MANAJEMEN ANTI SUAP DI PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA

#### SUB AKSI



Peningkatan manajemen anti suap bagi perusahaan swasta



Peningkatan profesi anti suap di sektor swasta

#### OUTPUT

Penerapan sistem manajemen anti suap (standar yang mirip dengan ISO 37001 maupun panduan anti suap sektor swasta) secara meluas melalui Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, KADIN, Asosiasi Usaha dan Pemerintah Daerah



## MANAJEMEN ANTI SUAP

#### PENANGGUNG JAWAB

- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Kementerian BUMN



## Hasil yang diharapkan melalui Stranas PK:

- **Terwujudnya sistem perizinan nasional yang sederhana dan mendorong kepatuhan pemohon izin**
- **Mendorong transparansi korporasi untuk membuka data pemilik manfaat (beneficial ownership)**
- **Terbangunnya manajemen perusahaan sektor swasta yang mampu mencegah praktek suap oleh swasta kepada oknum pemerintah**

Terima Kasih